



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1393, 2014

KEMEN PU. Penggunaan. Peralatan Konstruksi.
Tata Cara. Jenis.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09/PRT/M/2014
TENTANG
JENIS DAN TATACARA PENGGUNAAN PERALATAN KONSTRUKSI
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Jenis dan Tatacara Penggunaan Peralatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5293);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG JENIS DAN TATACARA PENGGUNAAN PERALATAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.

3. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Unit Organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
4. Satker Pengguna PNBP adalah Satker yang dapat menggunakan sebagian dana PNBP untuk membiayai belanja negara setelah memperoleh izin penggunaan dana PNBP dari Menteri Keuangan.
5. Kepala Satker adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri Pekerjaan Umum yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Menteri Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran/Barang untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri Pekerjaan Umum/Kepala Satker untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran yang dikuasakan kepadanya.
7. Peralatan konstruksi adalah peralatan/alat-alat besar dan/atau alat-alat bantu yang dikuasai oleh UPT, Satuan Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum.
8. Penggunaan peralatan konstruksi adalah penggunaan peralatan/alat-alat besar dan/atau alat-alat bantu yang dikuasai oleh UPT/ Satker di Kementerian PU dan dalam kegiatan operasinya ditujukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.
9. Pengguna peralatan konstruksi adalah pihak-pihak lain yang secara langsung menggunakan peralatan konstruksi untuk kegiatan bidang pekerjaan umum dengan dikenakan tarif yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
10. Pejabat Pemungut adalah orang yang berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum ditunjuk untuk melakukan tindakan yang berakibat penerimaan Negara melalui pemungutan kepada wajib bayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Satker Pengguna PNBP dan para pihak pengguna peralatan konstruksi dalam rangka penghitungan dan penetapan tarif PNBP penggunaan peralatan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum.

- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan PNBP yang tertib dan berkepastian hukum.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. jenis peralatan konstruksi;
- b. formula perhitungan tarif penggunaan peralatan konstruksi; dan
- c. tatacara penggunaan peralatan konstruksi.

BAB II

JENIS PERALATAN KONSTRUKSI DAN FORMULA TARIF PENGGUNAAN
PERALATAN KONSTRUKSI

Pasal 4

- (1) Jenis peralatan konstruksi, daftar harga pokok peralatan konstruksi, daftar faktor pengali tarif penggunaan peralatan, penetapan umur ekonomis dan presentase biaya perbaikan peralatan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dengan tarif PNBP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Apabila terdapat jenis peralatan konstruksi yang belum tercantum pada Lampiran I, maka dapat menggunakan harga pasar yang mendekati.
- (2) Dalam hal jenis atau harga perolehan peralatan konstruksi tidak tercantum dalam lampiran I, maka diambil jenis dan harga perolehan yang tercantum dalam SIMAK BMN Satker Pengguna PNBP yang bersangkutan.

Pasal 5

Formula Perhitungan besaran penggunaan peralatan konstruksi dan contoh perhitungan tarif penggunaan peralatan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATA CARA PENGGUNAAN PERALATAN KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Permohonan Penggunaan Peralatan Konstruksi

Pasal 6

- (1) Pengguna peralatan konstruksi mengajukan permohonan penggunaan secara tertulis kepada Kepala Satker yang telah ditetapkan sebagai unit pengguna PNBP oleh Menteri Keuangan.

- (2) Permohonan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan jenis peralatan konstruksi, lokasi, jangka waktu, dan tujuan penggunaannya.
- (3) Jangka waktu penggunaan peralatan konstruksi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang.

Bagian Kedua

Persetujuan Penggunaan Peralatan Konstruksi

Pasal 7

- (1) Kepala Satker dapat memberikan persetujuan penggunaan untuk masa penggunaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Kepala UPT.
- (2) Pemberian persetujuan perpanjangan masa penggunaan peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala UPT paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 8

Persetujuan penggunaan peralatan konstruksi hanya berlaku untuk pekerjaan yang berada dalam wilayah kerja UPT yang bersangkutan, namun apabila peralatan konstruksi tersebut tidak berada dalam wilayah kerja UPT, maka penggunaannya dapat diupayakan pada UPT terdekat.

Bagian Ketiga

Perjanjian Penggunaan Peralatan Konstruksi

Pasal 9

- (1) Pejabat pemungut melakukan perjanjian penggunaan peralatan konstruksi dengan pihak pengguna peralatan konstruksi.
- (2) Substansi yang diatur dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. Para pihak
 - b. Dasar perjanjian
 - c. Maksud dan tujuan
 - d. Ruang lingkup
 - e. Jangka waktu
 - f. Tempat atau lokasi
 - g. Hak dan kewajiban
 - h. Force Majeure
 - i. Penyelesaian permasalahan

- j. Nilai perjanjian
- k. Asuransi
- l. Operator dan Mekanik
- m. Pemeliharaan peralatan konstruksi
- n. Mobilisasi dan demobilisasi
- o. Pengawasan
- p. Keselamatan Kerja
- q. Persyaratan penggunaan
- r. Pencatatan dan pelaporan penggunaan
- s. Penyerahan dan pengembalian peralatan
- t. Sanksi dan denda
- u. Pajak dan materai
- v. Berakhirnya perjanjian
- w. Lampiran

Pasal 10

Format dan contoh surat yang diperlukan dalam pelaksanaan penggunaan peralatan konstruksi meliputi :

- a. Surat permohonan penggunaan peralatan konstruksi;
- b. Surat persetujuan penggunaan peralatan konstruksi;
- c. Surat permohonan perpanjangan penggunaan peralatan konstruksi;
- d. Surat perjanjian penggunaan peralatan konstruksi
- e. Berita acara pengambilan peralatan dari pool; dan
- f. Berita Acara pengembalian peralatan di pool.

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Semua perjanjian penggunaan peralatan konstruksi yang dibuat sebelum diterbitkannya peraturan menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa perjanjian tersebut berakhir.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/KPTS/M/2004 tentang Pelaksanaan Perhitungan Formula Sewa Peralatan, Sewa Bangunan dan Tanah, dan Sewa Prasarana Bangunan di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2014
MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 09/PRT/M/2014
TENTANG
JENIS DAN TATACARA PENGGUNAAN
PERALATAN KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

**JENIS PERALATAN KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

- 1. JENIS DAN DAFTAR HARGA POKOK PERALATAN**
- 2. DAFTAR FAKTOR PENGALI TARIF PENGGUNAAN PERALATAN
PER JAM**
- 3. PENETAPAN UMUR EKONOMIS DAN PERSENTASE BIAYA
PERBAIKAN PERALATAN**

Tabel I.A
DAFTAR HARGA POKOK PERALATAN

| NO. | JENIS ALAT | MERЕК | TIPE | KAPASITAS | NEGARA | HARGA |
|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|----------------|
| 1 | ASBUTON CRUSHER | GOLDEN STAR | 5 TPH | 5 TPH | CHINA | 510.000.000 |
| 2 | ASBUTON DRAYER | FLAYING HORSE | DR 93 | | CHINA | 700.000.000 |
| 3 | ASPHALT FINISHER | VOGELE | S 800 | 1,3 M | JERMAN | 2.145.000.000 |
| | | | SUPER 1300-2 | 4,5 M | JERMAN | 3.080.000.000 |
| | | CATEPILLAR | AP 555 E | 4,5 M | USA | 3.014.000.000 |
| | | RYOGO | RDS-120 | | | 300.000.000 |
| | | HANTA | F45C3 | 4,5 M | | 2.695.000.000 |
| 4 | ASPHALT MIXING PLANT | BUKAKA | BAMP 800 B-FA | 50 TPH | INDONESIA | 2.920.500.000 |
| | | | BDN-50 | 50 TPH | INDONESIA | 1.917.000.000 |
| | | | BAMP 800 P-SA | 50 TPH | INDONESIA | 1.400.000.000 |
| | | NIIGATA | NDP-301 | 30 TPH | JEPANG | 1.428.000.000 |
| | | | 600A | 30 TPH | JEPANG | 1.428.000.000 |
| | | TANAKA | TSU-30 | 30 TPH | JEPANG | 1.428.000.000 |
| | | | TAP-PB30 | 30 TPH | JEPANG | 1.428.000.000 |
| 5 | ASPHALT PATCH MIXER | BUKAKA | BAPM-3 | 3 TPH | INDONESIA | 376.200.000 |
| | | FREDDY MIX | FM 500 | 1 TPH | INDONESIA | 307.780.000 |
| 6 | BACKHOE LOADER | JCB | 3CX Site Master | 0,9 M3 | INGGRIS | 858.000.000 |
| | | | 411 HT | 0,4 M3 | INGGRIS | 852.500.000 |
| | | | 3 CXSN 4T | | INGGRIS | 1.320.000.000 |
| | | CATTERPILAR | CAT 428 E | 1 - 0,7 M3 | USA | 1.064.712.000 |
| 7 | BATCHING PLANT | BINTANG TEKNIK | C3300 | 600 LITER | | 748.000.000 |
| 8 | BAR BENDER | STRONG | SSB-42 | 16-42 MM | INDONESIA | 51.811.000 |
| | | TOYO | B-32 | | JEPANG | 24.000.000 |
| | | PEDDING HOUSE | SPECIAL 42 | | | 45.000.000 |
| 9 | BAR CUTTER | STRONG | SSB-42 | 16-42 MM | INDONESIA | 51.811.000 |
| | | PEDDING HAUS | SIMPLEX 40 | 32 MM | JERMAN | 6.544.000 |
| | | TOYO | C-32 | 33 MM | JEPANG | 14.500.000 |
| 10 | BORE PILE MACHINE | TONE | 1 RCC-20 | 1500-2000 M | JEPANG | 4.992.000.000 |
| 11 | BULLDOZER | CATTERPILAR | D 3 K - XL | 1,5 M | AMERIKA | 1.266.265.000 |
| | | | D6D | | AMERIKA | 810.000.000 |
| | | KOMATSU | D 59 A-16 | 110 HP | JEPANG | 531.000.000 |
| | | | D-65 P | 100 HP | JEPANG | 979.000.000 |
| | | HITACHI | DX-145 | | JEPANG | 800.000.000 |
| | | BARATA | MTD-110 | | INDONESIA | 500.000.000 |
| 12 | CHAIN BLOCK | KITO MIGHTY | M3 CB300 | 30 TON | JEPANG | 111.650.000 |
| 13 | COLD MILLING MACHINE | HANTA | CRP50 | | JEPANG | 1.474.000.000 |
| | | CATTERPILAR | PM 200 | 2 M | AMERIKA | 5.218.000.000 |
| | | DYNAPAC | COMPACT PLANERS | 0,5 M | AMERIKA | 2.365.000.000 |
| | | WRITGEN | 130 F | | JERMAN | 4.620.000.000 |
| | | | SF 1900 VC | 1,9 M | JERMAN | 2.520.000.000 |
| | | | W 50 | 0,5 M | JERMAN | 1.996.500.000 |
| | | | W 100 | 1M | JERMAN | 2.893.000.000 |
| | | W 2000 | 2 M | JERMAN | 5.240.180.000 | |
| 14 | COLD RECYCLER MACHINE | WIRGENT | WR 2500 S | 2,4 M | JERMAN | 15.290.000.000 |
| 15 | DUTCHING MACHINE | BINTANG TEKNIK | JVPTF-300 | 74 MM | | 522.500.000 |
| 16 | EXCAVATOR ON TRACK | SUMITOMO | SH 200-3 | 0,8 M3 | JEPANG | 937.500.000 |
| | | KOMATSU | PC 200-7 | 0,8 M3 | JEPANG | 1.156.100.000 |
| | | | PC 200-8 | 0,8 M3 | JEPANG | 1.320.000.000 |
| | | JCB | JS 200 SC | 0,8 M3 | JEPANG | 1.226.500.000 |
| EXCAVATOR ON TRACK | VOLVO | EC2108 PRIME | 0,8 M3 | JEPANG | 1.155.000.000 | |
| | HYUNDAI | CUMMINS B5.9-C | 0,9 M2 | KOREA | 669.148.000 | |
| | | 210LC-3 | 0,8 M3 | KOREA | 816.000.000 | |
| | | ROBEX 210LC | 0,9 M3 | KOREA | 700.000.000 | |
| | CARTEPILLAR | 320D | 0,9 M3 | AMERIKA | 1.363.670.000 | |
| | KOBELCO | SK 200 | 0,8 M3 | JEPANG | 896.000.000 | |

DAFTAR HARGA POKOK PERALATAN

| NO. | JENIS ALAT | MEREK | TIPE | KAPASITAS | NEGARA | HARGA |
|-----|--|----------------|----------------------|---------------------|-----------|---------------|
| 17 | EXCAVATOR ON WHEEL | DAEWOO | SOLAR 130W-III | 0,80 M3 | KOREA | 656.000.000 |
| | | JCB | 3CK SITE MASTER | | JEPANG | 858.000.000 |
| | | CATTERPILAR | M 313 D | 0,8 M3 | USA | 2.500.000.000 |
| 18 | EXTENSION UNIT MONO STRAND | ENERPAC | 5DA1 | 20 TON | JEPANG | 176.000.000 |
| 19 | EXTENSION UNIT MULTY STRAND | ENERPAC | RRH-1508 | 150 TON | JEPANG | 181.500.000 |
| | | | | 100 TON | JEPANG | 60.000.000 |
| 20 | FORKLIFT | KOMATSU | F155 | 0,5 TON | JEPANG | 42.000.000 |
| | | | FD20-6 | 2,5 TON | JEPANG | 80.000.000 |
| | | | FD20-Z3 | 2,5 TON | JEPANG | 85.000.000 |
| | | | PATRIA FD50E-2 | 5 TON | JEPANG | 144.000.000 |
| | | ALLIS CHALMERS | 60 D | 3,5 TON | KOREA | 90.000.000 |
| 21 | GROUTING MACHINE | PUTZMEISTER | S5EVTM | 150 KG | | 264.000.000 |
| 22 | JEMBATAN BAILEY | MABEY JOHNSON | 200 | 36 M | INGGRIS | 750.000.000 |
| 23 | LAUNCHING TRUSS | BUKAKA | BLT-25 | 25 TON (50 @ 3 M) | | 1.963.500.000 |
| | | ACROW | | 40 TON | AUSTRALIA | 179.796.000 |
| 24 | MOBILE MIXER | FREDDY MIX | | 0,5 TON | | 196.900.000 |
| 25 | MOULD BEAM | SWF | Type I | | | 50.000.000 |
| | | | Type II | | | 95.000.000 |
| | | | Type III | | | 104.000.000 |
| | | WELCON | Type I | 13-19 M | AUSTRALIA | 150.000.000 |
| | | | Type II | 22-25 M | AUSTRALIA | 285.000.000 |
| | Type III | 28-31 M | AUSTRALIA | 312.000.000 | | |
| 26 | MOULD CULVERT | SWF | | Φ 60 cm | | 8.000.000 |
| | | | | Φ 80 cm | | 11.000.000 |
| | | | | Φ 100 cm | | 15.000.000 |
| | | | | Φ 150 cm | | 26.000.000 |
| 27 | MOULD DECK SLAB | SWF | | | | 5.000.000 |
| 28 | MOULD DIAPRAGMA | WELCON | | 104 M3/H | AUSTRALIA | 16.000.000 |
| | | SWF | Type I | | | 2.600.000 |
| | | | Type II | | | 3.000.000 |
| | | | Type III | | | 3.600.000 |
| 29 | MOULD PLANK | BUKAKA | BMP-50 | 50 M, H = 66 CM | INDONESIA | 495.000.000 |
| | | SWF | | | | 110.000.000 |
| 30 | MOVABLE PORTAL CRANE + HOIST + DRIVE MOTOR | INASA-HYUNDAI | HD | | KOREA | 2.425.500.000 |
| 31 | OVERHEAD TRAVELING CRANE | SWF NOVA | SWF NCO4L4BEP341AT1F | 6,3 TON | JERMAN | 320.745.700 |
| 32 | PORTAL CRANE | SWF | | 25 TON | | 39.373.000 |
| 33 | PNEUMATIC TIRE ROLLER | HAMM | GRW15 | 15 TON | JERMAN | 1.265.000.000 |
| | | | TS 200 | 15 TON | JEPANG | 1.375.000.000 |
| | | SAKAI | SW 502 - 1 | 4 TON | JEPANG | 616.000.000 |
| | | | SW 652 | 7 TON | JEPANG | 826.100.000 |
| | | | TS200 | 15 TON | JEPANG | 990.000.000 |
| 34 | SKIP CONCRETE | BINTANG TEKNIK | BT0,8M3 | 600 LITER | INDONESIA | 26.400.000 |
| 35 | SLURRY SEAL (MICRO SURFACING EQUIPMENT) | XRMC | MS9B | 10 M3 | CHINA | 3.520.000.000 |
| 36 | STONE CRUSHER | BUKAKA | BSC-50JC | 50 TPH | INDONESIA | 2.200.000.000 |
| | | GOLDEN STAR | | 70 TPH | JEPANG | 2.117.000.000 |
| 37 | STRESSING JACK | HYDROTEC | | 100 TON | JEPANG | 389.785.000 |
| | STRESSING JACK | ENERPAC | | 100 TON | JEPANG | 393.250.000 |
| 38 | SYNCHRONOUS CHIP SEALER | METONG | LMT5250TFC | 9 M3 | CHINA | 2.145.000.000 |
| 39 | TRHEE WHEEL ROLLER | RUHAAK | 3Y-8/10 | 8 TON | | 224.000.000 |
| | | BARATA | MVH-11 | 11 TON | INDONESIA | 222.000.000 |
| | | | MV-6P | 8 TON | INDONESIA | 126.000.000 |
| | | BOMAG | 3W-10 | 12 TON | USA | 333.000.000 |
| | | SAKAI | KD-7608 | 8 TON | JEPANG | 258.000.000 |
| | | | KD-7610 | 10 TON | JEPANG | 309.000.000 |
| | | | KH-2410 | 10 TON | JEPANG | 309.000.000 |
| | KM-2108 | 12 TON | JEPANG | 372.000.000 | | |
| 40 | TRUK TANKI AIR | HINO | - | 16 TON | JEPANG | 622.969.000 |
| | | | DUTRO 110 | 5 TON | JEPANG | 211.013.000 |
| | | MITSUBISHI | FN517ML2 | 16.000 LTR | JEPANG | 594.000.000 |
| | | | ISUZU | ELF 220PS | 5.000 LTR | JEPANG |
| | | | ELF 120 PS | 4500 LITER | JEPANG | 264.000.000 |

DAFTAR HARGA POKOK PERALATAN

| NO. | JENIS ALAT | MEREK | TIPE | KAPASITAS | NEGARA | HARGA | |
|-----|------------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|-------------|
| 41 | VIBRATORY ROLLER | SAKAI | SV 512D | 10 TON | JEPANG | 630.000.000 | |
| | | | SW 800 | 10 TON | JEPANG | 1.430.000.000 | |
| | | | SW 652-1K | 6 TON | JEPANG | 990.000.000 | |
| | | TEREX | HAMM | SW 502-1 | 4 TON | JEPANG | 495.000.000 |
| | | | | TV 1400 | 4 TON | JEPANG | 462.000.000 |
| | | HAMM | 3520MP | 20 TON | JERMAN | 2.100.000.000 | |
| | | | HD 70 | 7.5 TON | JERMAN | 1.150.000.000 | |
| | | | 3410 | 6 TON | JERMAN | 893.742.851 | |
| | | | HD 14W | 4 TON | JERMAN | 594.000.000 | |
| | | | HD 10W | 4 TON | JERMAN | 594.000.000 | |
| | | BOMAG | 141 AD | 6.7 TON | USA | 483.000.000 | |
| | | | BW 318-AD | 4 TON | USA | 629.000.000 | |
| | | GRACE | LVR6 | 4 TON | | 649.000.000 | |
| | | DYNAPAC | CV47 | 6 TON | USA | 165.000.000 | |
| 42 | WATER PUMP | EBARA | SQPB 150 | 3.000 LPM | JEPANG | 36.353.900 | |

Tabel I.C

PENETAPAN UMUR EKONOMIS DAN PERSENTASE BIAYA PERBAIKAN PERALATAN

| NO. | JENIS PERALATAN | UMUR EKONOMIS | | BIAYA PERBAIKAN TERHADAP HARGA POKOK (%) |
|-----|---|---------------|--------|--|
| | | TAHUN | JAM | |
| 1 | ASBUTON CRUSHER | 6 | 12.000 | 90 |
| 2 | ASBUTON DRAYER | 6 | 12.000 | 90 |
| 3 | ASPHALT FINISHER | 6 | 12.000 | 90 |
| 4 | ASPHALT MIXING PLANT | 10 | 15.000 | 90 |
| 5 | ASPHALT PATCH MIXER | 5 | 10.000 | 90 |
| 6 | BACKHOE LOADER | 5 | 10.000 | 90 |
| 7 | BATCHING PLANT | 15 | 30.000 | 90 |
| 8 | BAR BENDER | 5 | 10.000 | 90 |
| 9 | BAR CUTTER | 5 | 10.000 | 90 |
| 10 | BORE PILE MACHINE | 10 | 15.000 | 90 |
| 11 | BULLDOZER | 5 | 10.000 | 90 |
| 12 | CHAIN BLOCK | 3 | 6.000 | 90 |
| 13 | COLD MILLING MACHINE | 5 | 10.000 | 90 |
| 14 | COLD RECYCLER MACHINE | 5 | 10.000 | 90 |
| 15 | DUCTING MACHINE | 5 | 10.000 | 90 |
| 16 | EXCAVATOR ON TRACK | 5 | 10.000 | 90 |
| 17 | EXCAVATOR ON WHEEL | 5 | 10.000 | 90 |
| 18 | EXTENSION UNIT MONO STRAND | 5 | 10.000 | 90 |
| 19 | EXTENSION UNIT MULTY STRAND | 5 | 10.000 | 90 |
| 20 | FORKLIFT | 5 | 10.000 | 90 |
| 21 | GROUTING MACHINE | 5 | 10.000 | 90 |
| 22 | JEMBATAN BAILLEY | 15 | 30.000 | 90 |
| 23 | LUNCHING TRUSS | 5 | 10.000 | 90 |
| 24 | MOBILE MIXER | 5 | 10.000 | 90 |
| 25 | MOULD BEAM | 10 | 20.000 | 65 |
| 26 | MOULD CULVERT | 10 | 20.000 | 65 |
| 27 | MOULD DECK SLAB | 10 | 20.000 | 65 |
| 28 | MOULD DIAPRAGMA | 10 | 20.000 | 65 |
| 29 | MOULD PLANK | 10 | 20.000 | 65 |
| 30 | MOVABLE PORTAL CRANE+HOIST+DRIVE MOTOR | 5 | 10.000 | 90 |
| 31 | OVERHEAD TRAVELING CRANE | 5 | 10.000 | 90 |
| 32 | PORTAL CRANE | 5 | 10.000 | 90 |
| 33 | PNEUMATIC TIRE ROLLER | 5 | 10.000 | 90 |
| 34 | SKIP CONCRETE | 5 | 10.000 | 90 |
| 35 | SLURRY SEAL (MICRO SURFACING EQUIPMENT) | 5 | 10.000 | 90 |
| 36 | STONE CRUSHER | 5 | 10.000 | 90 |
| 37 | STERESSING JACK | 5 | 10.000 | 90 |
| 38 | SYNCRONOUS CHIP SEALER | 5 | 10.000 | 90 |
| 39 | THREE WHEEL ROLLER | 5 | 10.000 | 90 |
| 40 | TRUK TANKI AIR | 5 | 10.000 | 90 |
| 41 | VIBRATORY ROLLER | 5 | 10.000 | 90 |
| 42 | WATER PUMP | 3 | 6.000 | 65 |

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIC INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 09/PRT/M/2014
TENTANG
JENIS DAN TATACARA PENGGUNAAN
PERALATAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM

**PERHITUNGAN FORMULA TARIF PENGGUNAAN
PERALATAN KONSTRUKSI**

FORMULA PERHITUNGAN TARIF PENGGUNAAN PERALATAN KONSTRUKSI

Formula perhitungan tarif penggunaan peralatan konstruksi sebagaimana ditetapkan pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum, adalah sebagai berikut:

$$\text{Tarif} = \frac{7 \times H \times FP \times HP}{1.000.000}$$

Keterangan parameter formula:

- 7 adalah standar jumlah jam kerja alat per hari
- H adalah jumlah hari penggunaan alat
- FP adalah faktor pengali pada jenis alat, umur ekonomis alat, umur pada tahun penggunaan, persentase biaya pemeliharaan selama umur ekonomis yang nilai-nilainya ditetapkan dalam bentuk tabulasi sebagaimana tabel I.B (Lampiran I)
- HP adalah harga pokok alat yang nilai-nilainya ditabulasikan berdasarkan harga pengadaan/pembelian sebagaimana tabel I.A (Lampiran I)
- 1.000.000 adalah bilangan similitude sebagai dasar menetapkan nilai-nilai FP

**CONTOH PERHITUNGAN TARIF PENGGUNAAN PERALATAN
KONSTRUKSI**

Perusahaan "ABCD" menggunakan peralatan konstruksi milik Kementerian Pekerjaan Umum dengan data sebagai berikut:

- Bulldozer Catterpillar D 3 K – XL yang diproduksi pada tahun 2010
- Lamanya penggunaan alat adalah 10 hari terhitung mulai tanggal 1 Mei 2014

Perhitungan Tarif Penggunaan Peratan:

$$\text{Tarif Alat} = \frac{7 \times H \times \text{FP} \times \text{HP}}{1.000.000}$$

Keterangan parameter formula:

- 7 = standar jumlah jam kerja alat per hari
- H = Jumlah hari kerja = 10 Hari
- FP = Faktor pengali = 75,08
- HP = harga pokok peralatan = Rp. 1.266.265.000,-

$$\text{Tarif Alat} = \frac{(7 \times 10) \times 75,08 \times \text{Rp. 1.266.265.000}}{1.000.000}$$

$$\text{Tarif Alat} = \text{Rp. 6.654.982,-}$$

Maka besaran tarif penggunaan Bulldozer Catterpillar D 3 K – XL produksi tahun 2010 selama 10 hari pada tahun 2014 adalah: Rp. 6.654.982,-

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 09/PRT/M/2014
TENTANG
JENIS DAN TATACARA PENGGUNAAN
PERALATAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM

**BENTUK SURAT PERJANJIAN
PENGGUNAAN PERALATAN KONSTRUKSI**

SURAT PERJANJIAN PENGGUNAAN PERALATAN KONSTRUKSI

NOMOR : _____

Pada hari ini _____ tanggal ____ Bulan _____ tahun _____ kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. _____ : Kepala UPT/Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pemungut _____ berdasarkan _____ yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT/Satuan Kerja _____ berkedudukan di _____ yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. _____ : Direktur/Kepala Cabang Perusahaan _____ Kontraktor pada Kegiatan _____ berdasarkan _____ yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan _____ yang berkedudukan di _____ yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan ketentuan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan _____ Nomor _____ tanggal _____ dan surat persetujuan penggunaan peralatan konstruksi Nomor _____ tanggal _____ kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan perjanjian penggunaan peralatan konstruksi dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

JENIS, JUMLAH, JANGKA WAKTU DAN BIAYA PENGGUNAAN PERALATAN KONSTRUKSI

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan peralatan konstruksi dari PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menyerahkan peralatan konstruksi yang akan digunakan kepada PIHAK KEDUA, peralatan konstruksi dengan jenis, jumlah jangka waktu dan biaya penggunaan sebagai berikut :

| No | Jenis | Merk dan Type | Tahun | Kode unit peralatan | Jangka Waktu Penggunaan | | Jml Hari | Biaya Penggunaan (dalam ribuan) | |
|----------|-------|---------------|-------|---------------------|-------------------------|-------------|----------|---------------------------------|--------------|
| | | | | | Tgl Mulai | Tgl Selesai | | Per hari | Jumlah 8 x 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| JUMLAH = | | | | | | | | | |

Terbilang : (_____ rupiah)

- (2) Perubahan jangka waktu penggunaan, perubahan dalam jumlah, jenis, merk dan type peralatan serta perubahan lainnya pada Surat Perjanjian ini hanya dapat dilakukan dengan Amandemen/adendum terhadap Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

REFERENSI SURAT PERJANJIAN PENGGUNAAN PERALATAN

Dalam hal penggunaan peralatan konstruksi, kedua belah pihak berpedoman pada :

- PP Nomor 38 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor ____ tahun 20__ Tentang Jenis dan Tatacara Penggunaan Peralatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum.

Pasal 3
PENYERAHAN DAN PENGEMBALIAN PERALATAN KONSTRUKSI

- (1) PIHAK KESATU menyerahkan peralatan tersebut dalam Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima peralatan tersebut dari PIHAK KESATU dalam keadaan baik, lengkap, dan siap pakai seperti tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Peralatan.
- (2) Setelah habis jangka waktu penggunaan peralatan, PIHAK KEDUA harus mengembalikan peralatan yang bersangkutan kepada PIHAK KESATU dalam keadaan baik, lengkap, dan siap pakai di Gudang/Pool Peralatan _____ (nama tempat) PIHAK KESATU.
- (3) Setiap kali dilakukan penyerahan atau pengembalian peralatan tersebut dalam ayat (1) dan (2) harus dibuatkan Berita Acara Serah Terima Peralatan dengan dilampiri lembar hasil pemeriksaan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mengembalikan peralatan dalam keadaan rusak ke Pool PIHAK KESATU, maka harus dibuatkan Berita Acara Pengembalian Peralatan di Pool, Selanjutnya PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan perbaikan peralatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (5) PIHAK KEDUA, harus menyerahkan Jaminan Perbaikan kepada PIHAK KESATU berupa Jaminan dari Bank Pemerintah atau Bank/Lembaga Keuangan lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebesar Rp _____ (sebesar biaya perbaikan peralatan tersebut), sebagai jaminan pelaksanaan perbaikan peralatan sebagaimana tersebut pada butir (4)
- (6) Sejak ditanda tangani Berita Acara Pengembalian Peralatan di Pool oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA maka perhitungan penggunaan peralatan diakhiri.

Pasal 4
BIAYA BONGKAR PASANG DAN BIAYA PENGANGKUTAN

- (1) Semua biaya bongkar-pasang peralatan dalam proses pengangkutan termasuk uji coba ditanggung PIHAK KEDUA
- (2) Biaya Pengangkutan peralatan dari Gudang/Pool PIHAK KESATU ke lokasi PIHAK KEDUA dan dari lokasi PIHAK KEDUA ke Gudang/Pool PIHAK KESATU ditanggung oleh PIHAK KEDUA

Pasal 5
BIAYA OPERASI DAN BIAYA PEMELIHARAAN

- (1) Selama jangka waktu penggunaan peralatan, biaya operasi dan biaya pemeliharaan (perawatan dan perbaikan) menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2) Ketentuan pemeliharaan (perawatan dan perbaikan), pemakaian bahan bakar, bahan pelumas, dan minyak hidrolik harus sesuai dengan petunjuk PIHAK KESATU.
- (3) Biaya Perbaikan terhadap kerusakan berat ataupun kehilangan yang diakibatkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA, seluruhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6
PEMBAYARAN PENGGUNAAN PERALATAN KONSTRUKSI

- (1) Pembayaran penggunaan peralatan oleh PIHAK KEDUA sebesar Rp _____ (_____ rupiah) seperti tersebut dalam pasal 1 dilakukan dengan menyeteror ke Kas Negara dan menyerahkan buki setor ke PIHAK KESATU.
- (2) Seluruh biaya penggunaan peralatan tersebut dalam pasal 1, harus sudah lunas sebelum berakhir.
- (3) Pembayaran biaya penggunaan peralatan tersebut pada ayat (1) pasal ini dibukukan pada Satuan Kerja _____ dengan Kode Akun _____ (_____).

Pasal 7
PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN

- (1) Dalam penggunaan peralatan PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA wajib mematuhi petunjuk PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang menggunakan peralatan tersebut dalam pasal 1 untuk pekerjaan diluar ketentuan yang terbut dalam perjanjian ini.
- (3) PIHAK KEDUA dilarang memindahtangankan hak penggunaan peralatan tersebut dalam pasal 1 kepada PIHAK lain.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang mengubah bentuk peralatan dan atau fungsi peralatan tersebut dalam pasal 1 kecuali dengan persetujuan PIHAK KESATU.
- (5) PIHAK KEDUA wajib melakukan pemeliharaan peralatan sesuai petunjuk PIHAK KESATU.

Pasal 8
OPERATOR DAN MEKANIK

- (1) Operator dan Mekanik untuk peralatan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA harus berkemampuan baik/mempunyai SIM untuk peralatan konstruksi.
- (2) PIHAK KESATU berhak membatalkan persetujuan tersebut dalam pasal 1 apabila terbukti bahwa operator dan mekanik PIHAK KEDUA melakukan kesalahan prosedur yang menurut PIHAK KESATU merusak/mengurangi nilai peralatan tersebut.
- (3) Biaya Operator dan Mekanik tersebut ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 9
PENCATATAN/LAPORAN

- (1) Laporan harian penggunaan peralatan dibuat oleh PIHAK KEDUA dan diperiksa/disetujui oleh petugas PIHAK KESATU.
- (2) Laporan penggunaan peralatan mencakup semua kegiatan peralatan dan jam kerja pemakaian peralatan sesuai petunjuk PIHAK KESATU.

Pasal 10
KESELAMATAN KERJA

- (1) PIHAK KEDUA wajib melakukan usaha-usaha agar terjamin keselamatan kerja di lingkungannya, dengan menyediakan antara lain: fasilitas pemadam kebakaran, alat pengaman, dan obat-obatan (P3K)
- (2) PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab atas kecelakaan yang dialami para karyawan yang dipekerjakannya, dengan memberikan tuntutan ganti rugi yang disebabkan cacat atau kematian dan sebab-sebab lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
P E N G A W A S A N

- (1) PIHAK KESATU menunjuk satu orang petugas atau lebih sebagai wakil dari PIHAK KESATU untuk melakukan pengawasan atas penggunaan, pemeliharaan dan pengadministrasian peralatan tersebut dalam pasal 1.
- (2) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan pengawasan tersebut menjadi beban PIHAK KEDUA.

Pasal 12
JAMINAN PENGGUNAAN PERALATAN

- (1) Pada waktu menandatangani surat perjanjian penggunaan peralatan ini, PIHAK KEDUA harus menyerahkan jaminan penggunaan peralatan kepada PIHAK KESATU, berupa jaminan dari Bank Pemerintah atau Bank/Lembaga Keuangan lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebesar Rp _____ (_____) dan berlaku sampai dengan 2 bulan setelah batas waktu penggunaan peralatan tersebut dalam pasal 1 berakhir.
- (2) Jaminan penggunaan peralatan dapat diperbaharui/dikurangi sesuai dengan perubahan pengembalian peralatan tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan (3).
- (3) Jaminan penggunaan peralatan dikembalikan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah mengembalikan peralatan yang digunakan sesuai dalam pasal 1 ayat (3).

Pasal 13
A S U R A N S I

- (1) PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan peralatan yang akan dipindahkan/diangkut.
- (2) PIHAK KEDUA mengasuransikan peralatan berikut operator selama penggunaan peralatan.
- (3) PIHAK KEDUA mengasuransikan peralatan atas nama PIHAK KESATU.

Pasal 14
PAJAK DAN BIAYA MATERAI

- (1) Meterai: sebesar Rp _____ (_____) atas surat perjanjian ini menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- (2) Pembayaran Pajak lainnya sehubungan dengan dibuatnya Surat Perjajian ini menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 15
D E N D A

Keterlambatan pengembalian peralatan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU melampaui batas jangka waktu penggunaan seperti tersebut dalam pasal 1, maka untuk keterlambatan setiap hari kalender, PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar tarif penggunaan perhari dari peralatan yang belum dikembalikan.

Pasal 16
S A N K S I

- (1) Apabila PIHAK KEDUA lalai atau dipandang tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan/ ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini, serta tidak mengindahkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, dan apabila PIHAK KEDUA dianggap belum memenuhi syarat-syarat atau petunjuk-petunjuk sebagaimana mestinya, maka PIHAK KESATU berhak membatalkan surat perjanjian ini sepihak tanpa tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA, dan uang jaminan tersebut dalam pasal 12 disetor ke Kas Negara.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA ternyata mengembalikan peralatan tersebut pasal 1 kepada PIHAK KESATU tidak sesuai dengan pasal 3 ayat (3), maka jaminan penggunaan peralatan akan menjadi milik PIHAK KESATU dan mencairkan jaminan dimaksud untuk seterusnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Apabila ternyata PIHAK KEDUA mengembalikan peralatan tersebut dalam pasal 1 kepada PIHAK KESATU dalam keadaan tidak sesuai dengan pasal 3 ayat (2), maka PIHAK KESATU berhak untuk melaksanakan perbaikan peralatan dimaksud baik di bengkel Kementerian Pekerjaan Umum ataupun di bengkel lainnya, tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA, dan segala biaya yang diperlukan untuk perbaikan peralatan dimaksud sepenuhnya menjadi beban PIHAK KEDUA yang akan diperhitungkan di dalam pengembalian jaminan penggunaan peralatan sesuai pasal 12.

Pasal 17
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah, peperangan, blokade, pemberontakan, pemogokan, kebakaran, epidemic, dan bencana alam seperti tsunami, banjir, dan gempa bumi.
- (2) Jika terjadi Force Majeure maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak terjadinya Force Majeure, demikian pula bila Force Majeure telah Berakhir.
- (3) Apabila terjadi Bencana Alam dan PIHAK KESATU membutuhkan peralatan tersebut pada pasal 1, PIHAK KEDUA segera mengembalikan peralatan tersebut kepada PIHAK KESATU tanpa mengajukan tuntutan ganti rugi, sedangkan biaya penggunaan peralatan diperhitungkan sejumlah hari penggunaan Peralatan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 18
PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul antara kedua belah PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
- (2) Bila tidak tercapai mufakat persetujuan bersama dalam penyelesaian secara musyawarah maka untuk hal-hal yang bersifat teknis, pihak yang dirugikan dapat mengajukan persoalannya kepada Panitia Arbitrase yang terdiri dari seorang yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU, seorang anggota yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA, dan seorang anggota lain yang merangkap Ketua yang ditunjuk oleh kedua anggota tersebut.
- (3) Hal-hal lain dari tersebut pada ayat (2) akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 19
D O M I S I L I

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memilih kedudukan hukum yang tetap (domisili) bertempat di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri _____.

Pasal 20
P E N U T U P

- (1) Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian ini oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam Pasal-pasal Perjanjian ini dan seluruh ketentuan di dalam dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksinya mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah PIHAK, berdasarkan ketentuan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Dengan dan karena ketentuan pasal 20 ayat (1) tersebut, ketentuan pada pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan lagi di dalam perjanjian ini berlaku bagi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Surat Perjanjian Penggunaan Peralatan ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (4) Surat Perjanjian Penggunaan Peralatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK di _____ dalam rangkap _____ yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 2 (dua) diantaranya ditandatangani diatas meterai.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(_____)

(_____)

Tembusan Kontrak disampaikan kepada Yth :

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

CONTOH SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN PERALATAN KONSTRUKSI

Nomor : _____, _____ 20____
 Lampiran :

Kepada Yth
 Kepala UPT/Satuan Kerja

di - _____

Perihal : Permohonan Penggunaan Peralatan Konstruksi.

Dengan hormat ,

Dengan ini kami mengajukan permohonan penggunaan peralatan konstruksi sesuai daftar terlampir dengan waktu penggunaan ____ (_____) hari.

Peralatan tersebut akan digunakan/dioperasikan untuk pelaksanaan pekerjaan _____ yang berlokasi di _____.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami sampaikan alasan/dasar peminjaman peralatan tersebut sebagai berikut :

1. Diperyaratkan dalam Dokumen Tender, bahwa peralatan yang akan digunakan kontraktor untuk pelaksanaan pekerjaan pemborongan dalam peralatan Balai/Satker _____.
2. Dalam Dokumen Tender Peralatan disediakan sendiri oleh Kontraktor, tetapi peralatan kami tidak mencukupi/belum ada sedangkan Plant Hire setempat tidak dapat menyediakan peralatan tersebut/Plant Hire tidak ada di wilayah ini
3. Peralatan yang kami butuhkan tidak tersedia pada Plant Hire/instansi lain tidak ada yang menyewakan peralatan sejenis.

Rekomendasi Kepala UPT/Satuan kerja

(Kegiatan yang akan dikerjakan dengan peralatan tersebut)

Dalam hal ini kami tunduk dan mematuhi segala persyaratan yang berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum.

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
 Direktur/Kepala Cabang Perusahaan

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Direktur _____
2. Bapak Kepala Balai _____
3. Peninggal

(Nama Terang)

CONTOH PERSETUJUAN PENGGUNAAN PERALATAN KONSTRUKSI

Nomor : _____, _____ 20__

Lamiran :

Kepada Yth
Direktur/ Kepala Cabang Perusahaan_____
di-
_____Perihal : **Persetujuan Penggunaan Peralatan Konstruksi**

Setelah mempelajari surat permohonan penggunaan peralatan konstruksi dari perusahaan _____ serta saran teknis dari unit peralatan/logistik bersama ini kami menyetujui dilaksanakannya penggunaan peralatan konstruksi sebagaimana terlampir dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kondisi peralatan sebagaimana terlampir.
2. Biaya penggunaan peralatan konstruksi disetor kepada Bendahara Penerima atau disetor langsung ke kas Negara dengan melampirkan bukti setor.
3. Perhitungan biaya penggunaan peralatan konstruksi menggunakan formula pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: _____

Demikian untuk diketahui dan atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala UPT/Satuan Kerja

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Unit Peralatan/Logistik
2. Peninggal

_____(Nama Terang)_____
NIP. _____

SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN PENGGUNAAN PERALATAN KONSTRUKSI

Nomor : _____, _____ 20____
 Lampiran : _____

Kepada Yth
 Kepala UPT/Satuan Kerja

di - _____

Perihal : **Permohonan Perpanjangan Penggunaan Peralatan Konstruksi.**

Dengan hormat ,

Dengan ini kami mengajukan permohonan Perpanjangan penggunaan peralatan konstruksi sesuai daftar terlampir dengan waktu penggunaan _____ (_____) hari.

Peralatan tersebut akan digunakan/dioperasikan untuk pelaksanaan pekerjaan _____ yang berlokasi di _____.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami sampaikan alasan/dasar peminjaman peralatan tersebut sebagai berikut :

1. Dipersyaratkan dalam Dokumen Tender, bahwa peralatan yang akan digunakan kontraktor untuk pelaksanaan pekerjaan pemborongan dalam peralatan Balai/Satker _____.
2. Dalam Dokumen Tender Peralatan disediakan sendiri oleh Kontraktor, tetapi peralatan kami tidak mencukupi/belum ada sedangkan Plant Hire setempat tidak dapat menyediakan peralatan tersebut/Plant Hire tidak ada di wilayah ini
3. Peralatan yang kami butuhkan tidak tersedia pada Plant Hire/instansi lain tidak ada yang menyewakan peralatan sejenis.

Rekomendasi Kepala UPT/Satuan kerja

 (Kegiatan yang akan dikerjakan dengan peralatan tersebut)

Dalam hal ini kami tunduk dan mematuhi segala persyaratan yang berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum.

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami
 Direktur/Kepala Cabang Perusahaan

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Direktur _____
2. Bapak Kepala Balai _____
3. Pertinggal

 (Nama Terang)

BERITA ACARA PENGAMBILAN PERALATAN DARI POOL

Nomor : _____

Pada hari ini _____ Tanggal ____ Bulan _____ tahun _____ berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Peralatan Nomor : _____ tanggal _____ antara _____ dengan _____ maka kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : _____
 Jabatan : _____
 Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : _____
 Jabatan : _____
 Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU peralatan jumlah, jenis, merk/type, dan kondisi serta persyaratan lainnya yang perinciannya tercantum dalam lampiran Berita Acara ini.

Pasal 2

Serah Terima Peralatan Tersebut pada PASAL 1 dilakukan di Pool Peralatan Kantor Balai/Satuan Kerja _____ (nama tempat yang ditetapkan dalam perjanjian) .

Pasal 3

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap ____ (_____) untuk dipergunakan seperlunya.

Yang menyerahkan
PIHAK KESATU

Yang mengambil peralatan
PIHAK KEDUA

(_____)
NIP. _____

(_____)
NIP. _____

CONTOH BERITA ACARA PENGEMBALIAN PERALATAN DI POOL

Nomor : _____

Pada hari ini _____ Tanggal _____ Bulan _____ tahun _____
berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Peralatan Nomor : _____ tanggal
_____ antara _____ dengan _____ maka kami yang bertanda
tangan dibawah ini :

1. Nama : _____
Jabatan : _____
Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : _____
Jabatan : _____
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pasal 1

PIHAK KEDUA telah mengembalikan peralatan ke Pool PIHAK KESATU di _____
(sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian Penggunaan Peralatan) peralatan jenis, merk/type, dan
kondisi tercantum dalam lampiran Berita Acara ini.

Pasal 2

Peralatan tersebut pada pasal 1 akan diperbaiki PIHAK KEDUA dalam jangka waktu \leq 1 (satu)
bulan.

Pasal 3

PIHAK KESATU telah mengetahui dan menyaksikan pengembalian peralatan di Pool sebagaimana
tersebut pada pasal 1 diatas

Pasal 4

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap _____ (_____) untuk
dipergunakan seperlunya.

Yang menerima
PIHAK KESATU

Yang mengembalikan peralatan
PIHAK KEDUA

(_____)
NIP. _____

(_____)
Jabatan

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO